

## Strategi Pemerintah Dalam Mengoptimalkan Pengelolaan Aset Daerah Melalui Revitalisasi Pasar Bambaru Kota Palu

Ebitria <sup>1,\*</sup>; Sulfitri Husain <sup>2</sup>; Nur Alamsyah <sup>3</sup>

<sup>1</sup> Universitas Tadulako, Palu, Indonesia; ebit.21april@gmail.com

<sup>1</sup> Universitas Tadulako, Palu, Indonesia; alamsyah\_sip200@yahoo.com

<sup>1</sup> Universitas Tadulako, Palu, Indonesia; sulfitrih@gmail.com

\*Correspondence : ebit.21april@gmail.com

### ARTICLE INFO:

Kata kunci: *Pengelolaan aset daerah; Revitalisasi pasar; Strategi pemerintah; Pendapatan pelaku usaha; Pasar Bambaru*

Received : April 2026

Revised : April 2026

Accepted : Mei 2026

### ABSTRAK:

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi pemerintah dalam mengoptimalkan pengelolaan aset daerah melalui revitalisasi Pasar Bambaru di Kota Palu dengan menggunakan teori strategi pemerintah dari Geoff Mulgan (2009) yang mencakup aspek tujuan, lingkungan, pengarah, tindakan, dan pembelajaran. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif melalui *in-depth interview* dan dokumentasi terhadap lima informan dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Palu serta pelaku usaha pasar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi revitalisasi belum berjalan optimal, ditandai dengan belum meningkatnya pemanfaatan aset daerah dan pendapatan pelaku usaha secara signifikan. Hal ini disebabkan oleh kurang efektifnya sosialisasi program, lemahnya pendampingan, serta rendahnya motivasi pelaku usaha. Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa optimalisasi pengelolaan aset daerah tidak hanya bergantung pada pembangunan fisik, tetapi juga pada penguatan komunikasi, pemberdayaan, dan pembelajaran berkelanjutan. Penelitian ini berkontribusi dalam pengembangan kajian strategi pengelolaan aset daerah berbasis revitalisasi pasar tradisional, serta memberikan implikasi bagi pemerintah daerah dalam merancang kebijakan yang lebih partisipatif, adaptif, dan berorientasi pada peningkatan kapasitas pelaku usaha secara berkelanjutan.

### ABSTRACT:

*This study aims to analyze government strategies in optimizing regional asset management through the revitalization of Pasar Bambaru in Palu City by applying the government strategy theory proposed by Geoff Mulgan (2009), which includes the aspects of goals, environment, direction, actions, and learning. The method used is qualitative research with a descriptive approach, employing in-depth interviews and documentation involving five informants from the Department of Industry and Trade of Palu City as well as market business actors. The results indicate that the revitalization strategy has not been optimally implemented, as reflected in the lack of significant improvement in both the utilization of regional assets and the income of business actors, which is influenced by ineffective program socialization, weak assistance, and low motivation among business actors. The study concludes that optimizing regional asset management does not solely depend on physical development but also on*

*strengthening communication, empowerment, and continuous learning, and it contributes to the development of studies on regional asset management strategies based on traditional market revitalization while providing implications for local governments in designing policies that are more participatory, adaptive, and oriented toward sustainably enhancing the capacity of business actors.*

## Pendahuluan

Aset daerah merupakan bagian penting dari sumber daya pemerintah daerah yang mencakup barang milik daerah yang diperoleh melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) maupun sumber sah lainnya. Pengelolaan aset daerah meliputi rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, hingga penghapusan aset. Pengelolaan yang baik sangat diperlukan karena aset daerah berperan dalam mendukung penyelenggaraan pelayanan publik serta menjadi bagian dari implementasi prinsip *good governance* dalam reformasi birokrasi daerah (Maulidiah, 2017)

Optimalisasi pengelolaan aset daerah menjadi isu strategis karena aset yang tidak dikelola secara optimal dapat menjadi beban keuangan pemerintah. Banyaknya aset yang belum dimanfaatkan secara maksimal menunjukkan pentingnya penerapan prinsip penggunaan terbaik (*best use principle*) guna mendukung peningkatan pendapatan daerah (Toha, Ghiffari and Irzal, 2025). Selain itu, optimalisasi aset juga berkaitan dengan upaya menciptakan sistem manajemen yang efektif dan efisien dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Satmoko and Sari, 2024).

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan aset daerah masih menghadapi sejumlah tantangan. Penelitian (Permadi, 2018) menemukan bahwa pengelolaan aset pada Dinas Pendidikan Kota Salatiga belum optimal, khususnya pada aspek perencanaan dan pelaksanaan. Penelitian (Rahman, 2021) menjelaskan bahwa optimalisasi pengelolaan aset tanah daerah dipengaruhi oleh proses pengelolaan, faktor pendukung dan penghambat, serta dampaknya terhadap peningkatan PAD Kabupaten Mamuju. Sementara itu, penelitian (Sari, Afiah and Ryketeng, 2025) menunjukkan bahwa pengelolaan aset daerah yang terencana dan terorganisir dengan baik dapat meningkatkan efektivitas pemeliharaan dan kondisi fisik aset. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan pengelolaan aset sangat ditentukan oleh strategi yang diterapkan (Wulandari, 2019).

Meskipun demikian, kajian yang secara khusus membahas optimalisasi pengelolaan aset pasar daerah melalui revitalisasi dengan perspektif strategi pemerintah masih terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengisi kesenjangan tersebut dengan mengkaji pengelolaan aset pasar tradisional sebagai bagian dari strategi optimalisasi aset daerah.

Salah satu bentuk pemanfaatan aset daerah adalah pengelolaan pasar tradisional sebagai pusat aktivitas ekonomi masyarakat. Namun dalam praktiknya, pengelolaan pasar tradisional sering kali belum optimal, sehingga berdampak pada rendahnya

minat kunjungan masyarakat, pendapatan pedagang, serta penerimaan daerah (Syahputra, 2025). Pengelolaan aset yang efektif, termasuk barang milik daerah, dapat meningkatkan transparansi, efisiensi, dan kontribusi terhadap pembangunan daerah apabila didukung oleh manajemen keuangan yang baik (Rumbrar and Pasae, 2025)

Pemerintah Kota Palu memiliki aset daerah berupa Pasar Bambaru yang dikelola oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Revitalisasi pasar telah dilakukan untuk meningkatkan kualitas infrastruktur dan aktivitas ekonomi. Namun berdasarkan hasil pra observasi, revitalisasi tersebut belum menunjukkan peningkatan signifikan terhadap jumlah pengunjung maupun pendapatan pelaku usaha. Penurunan pendapatan pedagang serta tidak tercapainya target penerimaan pasar menunjukkan bahwa pengelolaan aset belum berjalan optimal. Kondisi ini sejalan dengan temuan (Silaban, 2023) yang menyatakan bahwa aset daerah tanpa strategi pengelolaan yang tepat cenderung tidak memberikan kontribusi maksimal terhadap pendapatan daerah.

Revitalisasi Pasar Bambaru yang belum optimal mengindikasikan adanya permasalahan dalam aspek perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan. Kurangnya koordinasi antara pemerintah dan pelaku usaha, terbatasnya promosi, serta minimnya evaluasi pasca revitalisasi menjadi faktor penghambat dalam pemanfaatan aset secara maksimal. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini difokuskan pada analisis optimalisasi pengelolaan aset daerah melalui revitalisasi Pasar Bambaru di Kota Palu, termasuk kendala yang dihadapi serta strategi pemerintah dalam meningkatkan pemanfaatan aset secara efektif dan berkelanjutan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi pemerintah dalam mengoptimalkan pengelolaan aset daerah melalui revitalisasi Pasar Bambaru di Kota Palu dengan menggunakan perspektif strategi pemerintah yang meliputi aspek tujuan, lingkungan, pengarahan, tindakan, dan pembelajaran. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian administrasi publik serta menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan pengelolaan aset yang lebih efektif, efisien, dan berkelanjutan.

## Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tujuan memahami secara mendalam optimalisasi pengelolaan aset daerah melalui revitalisasi Pasar Bambaru di Kota Palu. Pendekatan ini dipilih karena mampu menggali makna, persepsi, serta pengalaman informan terkait fenomena yang diteliti secara kontekstual dan komprehensif. Penelitian dilaksanakan di Pasar Bambaru, Kota Palu, dengan fokus pada pengelolaan aset pasar oleh pemerintah daerah serta pemanfaatannya oleh pelaku usaha.

Sumber data dalam penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara langsung dengan informan penelitian yang berjumlah 5 orang, terdiri dari 1 orang pegawai Dinas Perindustrian dan 4 orang Perdagangan Kota Palu yang terlibat dalam pengelolaan pasar serta pelaku usaha

pelaku usaha di Pasar Bambaru. Informan dipilih menggunakan teknik *purposive sampling* berdasarkan kriteria memiliki pengetahuan, pengalaman, dan keterlibatan langsung dalam pengelolaan maupun pemanfaatan aset pasar. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur dengan pedoman pertanyaan yang fleksibel sehingga peneliti dapat menyesuaikan arah pertanyaan sesuai perkembangan informasi di lapangan. Selama proses pengumpulan data, wawancara didokumentasikan melalui pencatatan lapangan dan transkripsi hasil percakapan untuk menjaga kelengkapan data.

Data sekunder dikumpulkan melalui teknik dokumentasi berupa dokumen resmi instansi terkait, laporan kegiatan, arsip kebijakan, serta dokumen lain yang relevan dengan fokus penelitian. Data ini digunakan untuk melengkapi serta memverifikasi informasi yang diperoleh dari hasil wawancara.

Teknik analisis data dalam penelitian kualitatif mengacu pada model interaktif yang dikembangkan oleh Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman (2014), yang terdiri atas empat tahapan, yaitu pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kondensasi data merupakan proses menyeleksi, memfokuskan, menyederhanakan, mengabstraksi, dan mentransformasi data yang diperoleh dari lapangan. Selanjutnya, data disajikan dalam bentuk narasi, tabel, atau matriks agar mudah dipahami, kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat sementara dan diverifikasi secara berkelanjutan hingga menghasilkan temuan penelitian yang valid (Miles, Huberman and Saldaña, 2014).

Untuk menjaga keabsahan data, penelitian ini menerapkan triangulasi sumber dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari wawancara dan dokumen pendukung. Selain itu, peneliti melakukan pengecekan ulang data melalui proses penelaahan catatan lapangan dan konsistensi informasi antar informan guna meningkatkan kredibilitas temuan penelitian sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

## Hasil

### 1. Tujuan (*Objective*)

Kerangka kebijakan publik dalam perspektif *environment* menurut Geoff Mulgan (2009), dipahami sebagai konteks eksternal yang membentuk ruang interaksi antara kapasitas institusi dan dinamika sosial-ekonomi yang berkembang. Lingkungan kebijakan tersebut mencakup berbagai faktor seperti kondisi politik, ekonomi, sosial, serta institusional yang bersifat dinamis dan saling berhubungan. Konteks ini tidak hanya memengaruhi kemampuan organisasi dalam merespons perubahan, tetapi juga menentukan arah pilihan strategis kebijakan yang diambil dalam proses perumusan dan implementasi kebijakan publik (Mulgan, 2009). Singkatnya, tujuan merupakan sarana yang ingin dicapai untuk menghasilkan dampak yang diharapkan, sehingga langkah yang diambil menjadi lebih terarah dan terstruktur. Dalam konteks pemerintahan, tujuan (*Objective*) berfungsi sebagai pedoman dalam pengambilan tindakan.

Dalam konteks optimalisasi pengelolaan aset daerah melalui revitalisasi Pasar

Bambaru Kota Palu, tujuan (*Objective*) menjadi indikator utama yang menentukan arah dan fokus kebijakan publik. Salah satu tujuan utama Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah adalah meningkatnya jumlah pelaku usaha industri kecil menengah yang mendaftarkan merek dagangnya.

Berdasarkan hasil penelitian mengenai tujuan (*Objective*) dalam optimalisasi pengelolaan aset daerah melalui revitalisasi Pasar Bambaru Kota Palu, wawancara dengan Bapak Ahmad Rifai, S.T. selaku Kepala Bidang Pasar Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Palu menyatakan bahwa:

*“kalau tujuan yang ingin di capai dari Disperindag sudah pasti meningkatkan jumlah pengunjung, meningkatkan jumlah pendapatan pelaku usaha di pasar bambaru dan untuk memulihkan kembali fungsi pasar bambaru agar lebih optimal. Tapi, pasti ada saja kendala yang di dapatkan seperti penataan, kalau misalnya pedagangnya itu taat dengan aturan penataan, mindsetnya berubah dari yang tidak bagus jadi diperbaiki, bisa saja tujuan yang ingin di capai oleh Disperindag bisa tercapai.”* (Wawancara Juli 2025)

Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa tujuan yang diharapkan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Palu belum sepenuhnya tercapai. Revitalisasi pasar diharapkan dapat meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan pelaku usaha, namun terdapat kendala seperti penataan pasar yang belum optimal serta pola pikir pelaku usaha yang belum berkembang. Pelaku usaha diharapkan mampu memperhatikan kondisi pasar agar lebih menarik, sehingga memberikan manfaat bagi penjual maupun pembeli.

Selanjutnya, hasil wawancara dengan Basuki (57 tahun) selaku pemilik usaha Qalbu di Pasar Bambaru menyatakan bahwa *“Adanya revitalisasi ini kami berharap daya beli di pasar ini jadi lebih baik, pengunjung jadi lebih banyak, tetapi kenyataannya itu terjadi di awal-awal saja, di bulan pertama, ditahun pertama, setelah itu sudah tidak ramai lagi. Padahal kami selaku pedagang di Pasar Bambaru berharap banyak dengan adanya revitalisasi ini.”* (Wawancara 7 Juli 2025)

Hal tersebut menunjukkan bahwa revitalisasi memberikan dampak positif pada tahap awal, namun dampak tersebut tidak berlangsung dalam jangka panjang. Hal ini disebabkan oleh belum adanya strategi keberlanjutan dari pemerintah yang mampu menjaga stabilitas jumlah pengunjung dan daya beli masyarakat. Pelaku usaha mengharapkan adanya tindak lanjut dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Palu, seperti penyelenggaraan kegiatan atau *event* yang dapat meningkatkan aktivitas pasar.

Realitas ini menunjukkan bahwa revitalisasi secara fisik belum sepenuhnya menjawab tantangan utama pedagang, yaitu menjaga keberlanjutan arus pengunjung. Revitalisasi tidak cukup hanya melalui perbaikan infrastruktur, tetapi perlu didukung oleh kebijakan pengelolaan, promosi berkelanjutan, serta pemberdayaan pedagang agar mampu beradaptasi dengan dinamika pasar modern.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu oleh (Permadi, 2018) mengenai analisis optimalisasi pengelolaan aset daerah pada Dinas Pendidikan Kota Salatiga yang menunjukkan bahwa pengelolaan belum berjalan optimal. Kendala ditemukan pada tahap perencanaan, pelaksanaan, serta penyusunan program yang

belum efektif. Berdasarkan teori optimalisasi menurut Winardi, optimalisasi menekankan tercapainya tujuan yang telah ditetapkan. Meskipun perencanaan telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, masih terdapat hambatan dalam penyusunan program yang belum memenuhi tahapan perencanaan secara efektif.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti, dapat disimpulkan bahwa tujuan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Palu untuk meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha Pasar Bambaru belum sepenuhnya tercapai. Faktor penghambat yang ditemukan meliputi pola pikir pelaku usaha serta tidak adanya strategi jangka panjang dari pemerintah dalam menjaga keberlanjutan dampak revitalisasi. Akibatnya, tujuan peningkatan daya beli dan jumlah pengunjung pasar belum terwujud secara optimal.

## 2. Lingkungan (*Environments*)

Lingkungan (*environment*) menurut Geoff Mulgan (2009) berkaitan dengan upaya pencapaian tujuan kebijakan, yaitu sebagai konteks tindakan baik pada masa kini maupun masa depan yang mencakup kondisi eksternal yang memengaruhi proses perumusan kebijakan. Lingkungan tersebut juga mencerminkan kapasitas yang dimiliki oleh suatu institusi dalam mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan. Dengan demikian, *environment* tidak hanya dipahami sebagai kondisi eksternal yang statis, tetapi juga sebagai ruang dinamis yang menentukan apakah tujuan kebijakan dapat dicapai secara efektif melalui interaksi antara peluang, tantangan, serta kemampuan organisasi dalam merespons perubahan (Candel and Biesbroek, 2016). Dalam konteks Kota Palu, lingkungan meliputi kondisi ekonomi, sosial, dan teknologi yang turut memengaruhi strategi pemerintah dalam pengelolaan pasar.

Berdasarkan hasil penelitian tentang lingkungan (*environments*) dalam optimalisasi pengelolaan aset daerah melalui revitalisasi Pasar Bambaru Kota Palu, wawancara dengan Bapak Ahmad Rifai, S.T. selaku Kepala Bidang Pasar Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Palu menyatakan bahwa:

*“sebagaimana yang kita tau perkembangan zaman sangat pesat maka dari itu para pelaku usaha harus menyesuaikan atau beradaptasi dengan lingkungannya mereka yang baru, tetapi pada kenyataannya tidak ada kenaikan jumlah pengunjung di pasar bambaru setelah revitalisasi, bisa saja dikarenakan adanya pergeseran masyarakat sekarang sudah beralih sistem pembelian online dan menurut saya pelaku usaha di pasar bambaru tidak mengembangkan diri dan terus bertahan dari model-model seperti itu, tidak ada perubahan.” (Wawancara 5 Juli 2025)*

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa revitalisasi Pasar Bambaru belum memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan jumlah pengunjung. Kondisi ini dipengaruhi oleh perubahan lingkungan eksternal, khususnya perkembangan teknologi serta pergeseran perilaku masyarakat yang cenderung memilih sistem pembelian *online* dibandingkan berbelanja langsung di pasar tradisional. Di sisi lain, pelaku usaha di Pasar Bambaru belum mampu menyesuaikan diri dengan dinamika lingkungan tersebut karena masih mempertahankan model penjualan konvensional dan belum mengembangkan strategi pemasaran yang sesuai dengan perkembangan zaman. Hal inilah yang berkontribusi

pada tidak meningkatnya kondisi perekonomian pelaku usaha di lingkungan Pasar Bambaru.

Selanjutnya, hasil wawancara dengan Ibu Rahma (43 tahun) selaku pemilik usaha Rahma Bag di Pasar Bambaru menyatakan bahwa:

*“kalau di lihat dari kondisi pasar sekarang ini saya sebagai pelaku usaha belum merasakan adanya keuntungan yang dapat dirasakan secara langsung, yang ada melainkan kerugian yang saya rasakan selaku pelaku usaha, terlebih lagi harus membayar lokasi tempat menjual yang cukup mahal yang tidak sebanding dengan penghasilan yang didapatkan.” (Wawancara 7 Juli 2025)*

Kondisi ekonomi pascarevitalisasi pasar menunjukkan bahwa lingkungan usaha belum sepenuhnya mendukung keberlanjutan aktivitas pedagang. Dampak yang dirasakan justru lebih dominan berupa kerugian, karena pendapatan yang diperoleh tidak sebanding dengan biaya yang harus ditanggung, khususnya biaya sewa atau pembayaran lokasi berjualan yang dianggap cukup tinggi. Hal ini memperlihatkan adanya ketidakseimbangan antara pengeluaran dan pemasukan pedagang, sehingga revitalisasi yang seharusnya meningkatkan kesejahteraan justru menambah beban ekonomi. Penurunan jumlah pengunjung Pasar Bambaru setelah revitalisasi turut berkontribusi terhadap penurunan pendapatan pelaku usaha.

Hasil penelitian ini diperkuat oleh penelitian terdahulu (Rahman, 2021) yang menunjukkan bahwa optimalisasi pengelolaan aset tanah daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Mamuju belum berjalan optimal. Faktor penghambat yang ditemukan antara lain keterbatasan sumber daya manusia, minimnya anggaran, serta lemahnya koordinasi. Temuan tersebut berkaitan dengan indikator lingkungan (*environments*) karena menunjukkan bagaimana faktor internal maupun eksternal memengaruhi keberhasilan strategi pengelolaan aset daerah.

Berdasarkan keseluruhan hasil wawancara yang dilakukan peneliti, dapat disimpulkan bahwa revitalisasi Pasar Bambaru belum memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan jumlah pengunjung. Selain itu, pelaku usaha juga belum mampu menyesuaikan diri dengan dinamika lingkungan yang terus berkembang karena masih bertahan pada model usaha lama, sehingga tujuan peningkatan kesejahteraan melalui optimalisasi pengelolaan aset daerah belum tercapai secara maksimal.

### 3. Pengarahan (*Direction*)

Pengarahan (*direction*) menurut Geoff Mulgan (2009) merujuk pada penentuan arah tujuan yang ingin dicapai oleh suatu pihak, termasuk penetapan hasil yang diharapkan serta prioritas dalam pelaksanaannya. Pengarahan tidak hanya berkaitan dengan penentuan tujuan akhir, tetapi juga mencakup bagaimana urutan pelaksanaan kebijakan atau strategi ditetapkan agar sejalan dengan visi yang telah dirumuskan (Pebriana, Mulyawan and Sutrisno, 2021). Dalam konteks militer, hal ini dikenal sebagai *“niat komandan”* yang ditempatkan pada bagian utama suatu perintah. Secara umum, pengarahan mencakup petunjuk, instruksi, atau arahan yang diberikan melalui koordinasi, komunikasi, serta motivasi yang tepat. Dalam konteks pemerintahan daerah, pengarahan menjadi bagian penting dalam menentukan

langkah-langkah yang dilakukan untuk memberikan pemahaman kepada pelaku usaha, sekaligus menunjukkan keterlibatan pemerintah dalam mendorong peningkatan kualitas dan produktivitas mereka.

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pengarahannya (*direction*) dalam optimalisasi pengelolaan aset daerah melalui revitalisasi Pasar Bambaru Kota Palu, wawancara dengan Bapak Ahmad Rifai, S.T. selaku Kepala Bidang Pasar Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Palu menyatakan bahwa *“Kalau kita selalu ada pengelola pasar, ada sosialisasi. Kemudian kalau di Dinas Perindustrian dan Perdagangan sendiri terkait untuk pasar bambaru itu ada inkubator bisnis, tugas inkubator bisnis itu mengarahkan pedagang-pedagang tentang tata cara berjualan dan cara pemasaran.”* (Wawancara 5 Juli 2025)

Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa dalam proses revitalisasi Pasar Bambaru terdapat upaya pemerintah melalui pengelola pasar dan program inkubator bisnis untuk memberikan pengarahannya kepada pedagang. Inkubator bisnis memiliki peran penting dalam memberikan arahan mengenai tata cara berjualan yang baik, termasuk strategi pemasaran untuk meningkatkan daya tarik produk dan memperluas jangkauan konsumen. Keberadaan program ini menunjukkan perhatian pemerintah terhadap peningkatan kapasitas sumber daya manusia, sehingga revitalisasi tidak hanya berfokus pada perbaikan infrastruktur, tetapi juga pada penguatan kompetensi pelaku usaha.

Namun demikian, efektivitas kegiatan sosialisasi maupun pendampingan melalui inkubator bisnis perlu dievaluasi secara berkelanjutan agar tidak hanya bersifat formalitas, tetapi benar-benar dapat diterapkan dalam praktik perdagangan sehari-hari. Arahan yang diberikan diharapkan mampu menjawab kebutuhan nyata pedagang, seperti strategi menghadapi persaingan dengan pasar modern, cara menarik minat konsumen, serta pemanfaatan teknologi digital dalam pemasaran.

Selanjutnya, hasil wawancara dengan Ibu Hasmiah (45 tahun) selaku pemilik usaha sepatu di Pasar Bambaru menyatakan bahwa:

*“sejauh ini pengarahannya yang pernah dilakukan pemerintah dengan maksud untuk meningkatkan jumlah pengunjung, bagaimana cara berdagang itu pernah ada dari Inkubator Bisnis, setelah itu tidak ada lagi. Menurut saya pribadi sosialisasi yang dilakukan pemerintah itu masih kurang, jadi saya tidak merasakan adanya perubahan sebelum atau sesudah dilakukannya sosialisasi.”* (Wawancara 8 Juli 2025)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa upaya pengarahannya pemerintah kepada pelaku usaha masih belum optimal. Program yang pernah dilaksanakan melalui inkubator bisnis tidak berlangsung secara berkelanjutan, sehingga menunjukkan kurangnya konsistensi dalam pembinaan jangka panjang. Selain itu, sosialisasi yang diberikan dinilai belum efektif karena tidak menghasilkan perubahan signifikan terhadap pola usaha maupun peningkatan jumlah pengunjung pasar.

Hasil penelitian ini diperkuat oleh penelitian terdahulu Riswana (2023) yang menunjukkan bahwa pengarahannya dan pelaksanaan yang baik dapat menjadi acuan dalam pemeliharaan aset daerah serta peningkatan kondisi fisik aset. Temuan tersebut relevan dengan penelitian ini karena keduanya menekankan pentingnya arahan,

koordinasi, dan instruksi pemerintah dalam mendukung pengelolaan aset. Indikator pengarah (*direction*) menurut Geoff Mulgan yang menitikberatkan pada instruksi dan koordinasi selaras dengan penelitian Riswana yang menyoroti pengorganisasian, perencanaan, dan pengendalian sebagai bentuk pengarah dalam pengelolaan aset.

Secara keseluruhan, kegiatan sosialisasi atau pengarah yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Palu bersama inkubator bisnis belum memberikan dampak signifikan terhadap perkembangan usaha pedagang di Pasar Bambaru. Oleh karena itu, diperlukan upaya perbaikan agar pelaku usaha memperoleh informasi yang lebih memadai serta mampu mengimplementasikan arahan tersebut dalam kegiatan perdagangan sehari-hari.

#### 4. Tindakan (*Action*)

Tindakan (*action*) menurut Geoff Mulgan (2009) merujuk pada cara suatu pihak mencapai tujuan melalui implementasi strategi, kebijakan, undang-undang, serta program yang dirancang secara terperinci. Tindakan dalam konteks ini tidak hanya berkaitan dengan pelaksanaan teknis kebijakan, tetapi juga mencakup peran kepemimpinan yang mampu menggerakkan dan menginspirasi aktor-aktor lain untuk berkomitmen terhadap tujuan yang telah ditetapkan (Mulgan, 2009).

Dalam konteks optimalisasi pengelolaan aset daerah melalui revitalisasi Pasar Bambaru Kota Palu, tindakan mencakup berbagai upaya yang dilakukan pemerintah daerah dengan memanfaatkan perangkat kelembagaan yang ada untuk mengoptimalkan fungsi pasar. Tindakan tersebut diwujudkan melalui strategi kolaboratif, penyediaan fasilitas, serta program yang diarahkan untuk meningkatkan aktivitas masyarakat di kawasan pasar.

Berdasarkan hasil penelitian mengenai tindakan (*action*) dalam optimalisasi pengelolaan aset daerah melalui revitalisasi Pasar Bambaru Kota Palu, wawancara dengan Bapak Ahmad Rifai, S.T. selaku Kepala Bidang Pasar Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Palu menyatakan bahwa:

*“Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Palu juga kemarin melakukan kolaborasi dengan Polisi Pamong Praja (POLPP) guna penertiban diluar agar banyak pembeli disana, tapi kembali lagi kalau pelaku usahanya tidak mengembangkan dirinya, bukan dari Pemerintah, tapi dari pelaku usaha itu sendiri. Di pasar bambaru juga ada mall pelayanan, mall pelayanan publik itu didirikan supaya pengunjung datang untuk mengurus KTP, SIM, supaya setelah mengurus disitu sekalian melihat dan belanja. Hadirnya mall pelayanan publik kami maksudkan untuk meningkatkan pengunjung supaya bisa berbelanja, karna keluhan pedagang bahwa pasar itu sepi, tapi mall pelayanan publik sendiri itu sunyi, mengeluh juga dorang tidak ada orang datang mengurus disitu. ada samsat digital juga di luar, semua sudah di upayakan dalam rangka menjadikan pasar bambaru itu tujuan, menjadikan pasar bambaru visit kunjungan, dengan adanya kunjungan bisa menghidupkan pasar bambaru.” (Wawancara 5 Juli 2025)*

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat diketahui bahwa Pemerintah Kota Palu melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan telah melakukan berbagai langkah strategis untuk mendukung revitalisasi Pasar Bambaru. Salah satu upaya yang dilakukan adalah kolaborasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja dalam penertiban area sekitar pasar guna menciptakan lingkungan yang tertib dan nyaman bagi

pengunjung. Selain itu, pemerintah juga menghadirkan inovasi berupa pembangunan Mall Pelayanan Publik di kawasan pasar sebagai strategi untuk menarik kunjungan masyarakat. Kehadiran fasilitas tersebut diharapkan mampu mendorong masyarakat tidak hanya mengurus layanan administrasi, tetapi juga melakukan aktivitas belanja di pasar. Penyediaan layanan tambahan seperti Samsat digital di sekitar kawasan pasar juga merupakan bagian dari strategi untuk menjadikan Pasar Bambaru sebagai pusat aktivitas masyarakat sekaligus tujuan kunjungan.

Namun demikian, berbagai upaya yang telah dilakukan belum sepenuhnya mencapai hasil yang diharapkan. Mall Pelayanan Publik yang dirancang sebagai daya tarik pengunjung masih relatif sepi dan belum dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat. Dampaknya, peningkatan jumlah pengunjung pasar belum dirasakan secara signifikan oleh pedagang. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara harapan pemerintah dengan realitas di lapangan. Selain itu, keberhasilan revitalisasi pasar tidak hanya bergantung pada upaya pemerintah, tetapi juga dipengaruhi oleh kemampuan pelaku usaha untuk berinovasi, mengembangkan usaha, serta beradaptasi dengan perubahan kebutuhan konsumen.

Hasil penelitian ini diperkuat oleh penelitian terdahulu Riswana (2023) yang menunjukkan bahwa indikator tindakan (*action*) tercermin melalui implementasi kebijakan dan strategi pemerintah daerah dalam bentuk program dan kegiatan konkret. Penelitian tersebut menegaskan bahwa keberhasilan optimalisasi aset sangat dipengaruhi oleh tindakan nyata pemerintah dalam mengelola serta memanfaatkan aset sesuai prosedur yang berlaku. Temuan ini relevan dengan penelitian ini, di mana Dinas Perindustrian dan Perdagangan melakukan kolaborasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja untuk menertibkan kawasan Pasar Bambaru sebagai upaya meningkatkan aktivitas pasar.

### **5. Pembelajaran (*Learning*)**

Pembelajaran (*learning*) menurut Geoff Mulgan (2009) merupakan mekanisme untuk memahami tidak hanya tindakan mana yang berhasil atau tidak berhasil, tetapi juga untuk mengevaluasi apakah terdapat kebutuhan untuk meninjau kembali tujuan, analisis, serta arah kebijakan yang telah ditetapkan. Dalam konteks strategi publik, *learning* berfungsi sebagai proses reflektif yang memungkinkan organisasi untuk terus memperbaiki kebijakan melalui umpan balik dari implementasi, sehingga kebijakan tidak bersifat statis, melainkan adaptif terhadap perubahan lingkungan dan hasil pelaksanaan (Lestari and Zebua, 2025). Keberhasilan atau kegagalan suatu tindakan dapat diketahui melalui proses pembelajaran atau evaluasi kinerja yang dilakukan oleh organisasi atau perangkat pemerintah. Proses tersebut mencakup kegiatan perbandingan, identifikasi permasalahan, serta penilaian strategi, sehingga pemerintah daerah dapat mengambil pelajaran sebagai dasar perumusan kebijakan selanjutnya.

Dalam konteks optimalisasi pengelolaan aset daerah melalui revitalisasi Pasar Bambaru Kota Palu, pembelajaran (*learning*) menjadi bagian penting dalam menilai efektivitas kebijakan revitalisasi yang telah dijalankan. Berdasarkan hasil penelitian,

wawancara dengan Bapak Ahmad Rifai, S.T. selaku Kepala Bidang Pasar Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Palu menyatakan bahwa:

*“rata-rata tetap kita evaluasi, evaluasinya seperti, kenapa makin berkurang. Bahwa perlu diketahui bukan hanya Kota Palu begitu, kalau mau jalan-jalan ke Kota lain semuanya sunyi. Makassar sunyi mall nya, manado sunyi, surabaya sunyi, karna sudah perubahan sistem perdagangan. Pasar bambaru itu momen tertentu baru rame, contohnya dekat lebaran atau tahun ajaran baru, beda dengan pasar lain. Saran saya untuk pelaku usaha kalau sudah di revitalisasi, pengembangan diri, istilannya merubah cara berjualan.” (Wawancara 5 Juli 2025)*

Evaluasi yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Palu menunjukkan bahwa revitalisasi pasar tidak dapat hanya berfokus pada aspek fisik semata. Perbaikan infrastruktur dan penyediaan fasilitas pendukung memang penting, namun tidak secara otomatis meningkatkan jumlah pengunjung maupun pendapatan pedagang. Hasil evaluasi menegaskan perlunya penguatan kapasitas pelaku usaha melalui pengembangan keterampilan berjualan dan penyesuaian strategi pemasaran.

Dalam konteks Pasar Bambaru, kemampuan pedagang dalam beradaptasi dengan perubahan perilaku konsumen menjadi faktor penting keberhasilan revitalisasi. Perubahan signifikan terlihat dari pergeseran pola belanja masyarakat menuju sistem berbasis *online* yang dianggap lebih praktis dan efisien. Kondisi ini menjadi tantangan bagi pedagang tradisional yang masih menggunakan pola perdagangan konvensional. Oleh karena itu, proses pembelajaran dari evaluasi menekankan pentingnya adaptasi pelaku usaha serta peran pemerintah daerah dalam menyediakan pelatihan, pendampingan, dan program pemberdayaan yang relevan dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan pasar modern.

Selanjutnya, hasil wawancara dengan Bapak Arifin (48 tahun) selaku pelaku usaha jual beli emas di Pasar Bambaru menyatakan bahwa *“kami selaku pelaku usaha berharap pemerintah harus lebih melihat pasar bambaru ini dan lebih diberdayakan lagi, ini sudah tahun ke tiga setelah dilakukannya revitalisasi tapi tidak menghasilkan perubahan yang menguntungkan bagi kami selaku pelaku usaha di pasar ini.” (Wawancara 9 Juli 2025)*

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa kondisi Pasar Bambaru pasca revitalisasi belum memberikan perubahan signifikan yang menguntungkan bagi pelaku usaha. Revitalisasi yang diharapkan dapat meningkatkan daya tarik pasar dan mendukung pertumbuhan ekonomi pedagang belum sepenuhnya tercapai. Salah satu faktor yang diidentifikasi adalah kurangnya perhatian dan pemberdayaan yang konsisten dari pemerintah dalam mendampingi pedagang.

Minimnya keterlibatan pemerintah dalam pendampingan menyebabkan perubahan yang dihasilkan lebih berfokus pada aspek fisik tanpa diikuti peningkatan kualitas lingkungan usaha. Akibatnya, pedagang masih menghadapi kendala dalam menarik pengunjung, meningkatkan penjualan, serta memperoleh keuntungan yang lebih baik. Dengan demikian, revitalisasi yang dilakukan belum memberikan dampak optimal terhadap kesejahteraan pedagang maupun keberlanjutan aktivitas ekonomi pasar.

Hasil penelitian ini diperkuat oleh penelitian terdahulu Fitri Wulandari (2019)

yang menemukan bahwa pengelolaan aset tanah milik pemerintah daerah belum berjalan optimal, terutama pada aspek pemanfaatan, pemeliharaan, dan penatausahaan. Hambatan tersebut menunjukkan adanya kelemahan dalam proses evaluasi dan tindak lanjut pemerintah daerah. Kondisi ini selaras dengan indikator pembelajaran (*learning*) karena menegaskan pentingnya evaluasi menyeluruh untuk menilai efektivitas kebijakan, mengidentifikasi kelemahan tata kelola, serta merumuskan strategi perbaikan di masa mendatang.

Berdasarkan keseluruhan pernyataan informan, dapat disimpulkan bahwa strategi yang diterapkan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Palu dalam mengoptimalkan pengelolaan aset daerah melalui revitalisasi Pasar Bambaru belum berjalan secara optimal. Hal tersebut disebabkan oleh kurangnya peran aktif dalam pemberdayaan pedagang secara berkelanjutan, sehingga tujuan peningkatan kesejahteraan pelaku usaha belum tercapai sepenuhnya.

## Pembahasan

### 1. Pencapaian Tujuan Revitalisasi Pasar Bambaru Dalam Rangka Optimalisasi Pengelolaan Aset Daerah

Tujuan (*objective*) dalam konteks kebijakan publik merupakan komponen fundamental yang menentukan arah dan fokus tindakan pemerintah dalam mencapai hasil yang diharapkan. Tujuan tidak hanya berfungsi sebagai penjelasan mengenai alasan suatu kebijakan dirumuskan, tetapi juga mencerminkan adanya kesenjangan (*gap*) antara kondisi aktual dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat yang ingin dicapai melalui intervensi kebijakan. Dalam konteks ini, tujuan menjadi dasar utama dalam merumuskan strategi, menentukan instrumen kebijakan, serta menyusun indikator evaluasi yang digunakan untuk mengukur keberhasilan implementasi.

Dalam perspektif *policy design*, tujuan yang dirumuskan secara spesifik, terukur, dan realistis merupakan prasyarat penting bagi efektivitas implementasi kebijakan karena berfungsi sebagai acuan dalam proses perencanaan hingga evaluasi kebijakan (Ramdani, Nurhannis and Abdi, 2024). Dengan demikian, kualitas perumusan tujuan sangat menentukan sejauh mana kebijakan dapat diimplementasikan secara konsisten dan menghasilkan dampak yang diharapkan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tujuan revitalisasi Pasar Bambaru yang ingin dicapai oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Palu adalah meningkatkan jumlah pengunjung, pendapatan pelaku usaha, dan memulihkan fungsi pasar agar lebih optimal. Namun, temuan wawancara dengan para pelaku usaha memperlihatkan bahwa tujuan tersebut belum sepenuhnya tercapai dalam jangka panjang. Keberhasilan awal dalam meningkatkan aktivitas pasar hanya terjadi pada periode awal pasca revitalisasi, namun tidak berkelanjutan karena tidak adanya strategi lanjutan yang mampu menjaga konsistensi kunjungan dan daya beli masyarakat.

Secara empiris, data dari Kementerian Perdagangan menunjukkan bahwa revitalisasi pasar tradisional umumnya hanya memberikan dampak peningkatan

aktivitas pada fase awal pasca pembangunan fisik, namun cenderung menurun kembali apabila tidak diikuti dengan penguatan manajemen pengelolaan pasar dan strategi pemasaran yang berkelanjutan. Hal ini mengindikasikan bahwa keberhasilan revitalisasi tidak hanya ditentukan oleh pembangunan infrastruktur, tetapi juga oleh keberlanjutan pengelolaan pasca revitalisasi.

Realitas tersebut menunjukkan bahwa revitalisasi yang hanya berfokus pada aspek fisik tanpa disertai pendekatan pengelolaan yang berkelanjutan cenderung menghasilkan dampak yang bersifat sementara. Keberhasilan kebijakan seharusnya tidak hanya diukur dari *output* fisik, tetapi juga dari keberlanjutan manfaat (*sustainability of outcomes*) bagi pelaku usaha dan masyarakat pengguna pasar. Para pedagang juga menekankan perlunya program lanjutan seperti promosi pasar, *event* rutin, pembinaan pemasaran, serta penguatan strategi usaha agar mampu bersaing dengan pasar modern.

Ketidakmampuan pedagang untuk beradaptasi dengan perubahan lingkungan usaha serta terbatasnya strategi responsif dari pemerintah turut menjadi faktor penghambat tercapainya tujuan revitalisasi secara optimal. Dalam konteks ini, literatur menunjukkan bahwa kebijakan publik yang tidak diikuti dengan perencanaan implementasi yang matang dan strategi adaptif cenderung tidak memberikan dampak signifikan terhadap kelompok sasaran, terutama ketika terjadi perubahan perilaku konsumen dan dinamika pasar yang cepat (Mann *et al.*, 2020). Secara teoritis, tujuan kebijakan publik merupakan bagian inti dalam kerangka *policy process* yang menentukan arah implementasi dan evaluasi kebijakan. Penelitian dalam literatur administrasi publik menegaskan bahwa tujuan yang jelas dan terukur membantu pemerintah dalam merumuskan strategi yang lebih terarah serta memungkinkan evaluasi yang lebih objektif terhadap efektivitas kebijakan, sehingga dapat meningkatkan kualitas hasil kebijakan bagi masyarakat (Satoh, Fritzler and Chan, 2016)

Selain itu, kejelasan tujuan juga berkaitan dengan kemampuan desain kebijakan dalam menjembatani kesenjangan antara perencanaan dan implementasi. Tanpa desain implementasi yang kuat, tujuan kebijakan berisiko tidak tercapai secara optimal meskipun telah dirumuskan dengan baik (Howlett, 2019). Kondisi ini terlihat dalam kasus Pasar Bambaru, di mana tujuan revitalisasi belum diikuti dengan strategi operasional jangka panjang yang mampu merespons perubahan lingkungan ekonomi secara dinamis.

Sebagai penguatan analisis, data menunjukkan adanya pergeseran perilaku konsumsi masyarakat ke arah pasar modern dan *e-commerce*, yang berdampak pada penurunan daya saing pasar tradisional apabila tidak diimbangi dengan inovasi layanan dan strategi pemasaran. Hal ini memperkuat argumentasi bahwa pencapaian tujuan revitalisasi tidak dapat hanya bertumpu pada pembangunan fisik, tetapi harus diintegrasikan dengan penguatan strategi adaptif dan inovasi pengelolaan pasar.

Secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa meskipun tujuan revitalisasi Pasar Bambaru telah dirumuskan dengan jelas, realisasi tujuan tersebut belum

tercapai secara maksimal karena keterbatasan strategi jangka panjang dan rendahnya kapasitas adaptif baik dari pemerintah maupun pelaku usaha. Oleh karena itu, diperlukan penyusunan strategi implementasi yang lebih komprehensif, adaptif, dan berkelanjutan berbasis *evidence-based policy* agar tujuan kebijakan dapat tercapai secara optimal. Integrasi antara tujuan, desain implementasi, dan evaluasi berkelanjutan menjadi kunci utama dalam memastikan keberhasilan revitalisasi pasar tidak hanya bersifat simbolik, tetapi juga memberikan dampak substantif bagi kesejahteraan pelaku usaha dan masyarakat.

## 2. Lingkungan Eksternal Terhadap Optimalisasi Pengelolaan Aset Daerah Melalui Revitalisasi Pasar Bambaru Kota Palu

Kerangka kebijakan publik dalam perspektif *environment* menurut Geoff Mulgan (2009) dipahami sebagai konteks eksternal yang membentuk ruang interaksi antara kapasitas institusi dan dinamika sosial-ekonomi yang berkembang. Lingkungan kebijakan tersebut mencakup berbagai faktor seperti kondisi politik, ekonomi, sosial, serta kelembagaan yang bersifat dinamis dan saling berhubungan. Konteks ini tidak hanya memengaruhi kemampuan institusi dalam merespons perubahan, tetapi juga menentukan arah pilihan strategis kebijakan yang diambil (Mulgan, 2009).

Perubahan lingkungan eksternal di Pasar Bambaru Kota Palu menunjukkan adanya transformasi signifikan, khususnya pada aspek teknologi dan perilaku konsumen. Hasil wawancara dengan Kepala Bidang Pasar Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Palu mengindikasikan bahwa peningkatan preferensi masyarakat terhadap sistem pembelian berbasis digital dan *online marketplace* menyebabkan penurunan jumlah kunjungan langsung ke pasar tradisional. Data ini diperkuat oleh tren nasional yang menunjukkan pertumbuhan transaksi *e-commerce* di Indonesia yang terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir berdasarkan laporan Kementerian Komunikasi dan Informatika serta Bank Indonesia, yang menandakan adanya pergeseran pola konsumsi masyarakat ke arah digital.

Penelitian (Agustin, Ahsan and Pradana, 2024) pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah juga menunjukkan bahwa lemahnya respons dan penanganan terhadap aset yang tidak kembali (kendaraan dinas yang masih dikuasai pihak lain) mencerminkan kurang optimalnya adaptasi kelembagaan terhadap permasalahan yang muncul dalam lingkungan eksternal organisasi. Hal ini memperlihatkan bahwa baik dalam konteks pengelolaan aset publik maupun pengelolaan pasar daerah, faktor lingkungan dan respons institusi menjadi variabel penting yang menentukan efektivitas kebijakan.

Perubahan tersebut memperlihatkan bahwa revitalisasi fisik pasar tidak secara otomatis menciptakan lingkungan yang kondusif bagi keberlanjutan aktivitas ekonomi pedagang. Adaptasi terhadap perubahan lingkungan menjadi faktor yang menentukan daya tahan pasar tradisional dalam menghadapi kompetisi dengan sektor ritel modern dan digital. Kondisi ini juga menunjukkan adanya kesenjangan antara modernisasi infrastruktur pasar dengan kesiapan adaptasi pelaku usaha dalam

merespons perubahan perilaku konsumen.

Ketidakseimbangan antara pendapatan dan biaya operasional pedagang menjadi indikasi bahwa lingkungan ekonomi pasca revitalisasi belum sepenuhnya mendukung keberlanjutan usaha. Salah satu pelaku usaha menyampaikan bahwa tingginya biaya sewa lapak tidak sebanding dengan pendapatan yang diperoleh, sehingga menimbulkan tekanan ekonomi yang cukup signifikan. Situasi ini mencerminkan bahwa lingkungan internal seperti kapasitas manajerial, strategi usaha, serta kemampuan adaptasi pelaku usaha turut menentukan keberhasilan mereka dalam memanfaatkan perubahan lingkungan eksternal.

Secara teoritis, pentingnya adaptasi terhadap lingkungan eksternal ditegaskan dalam kajian *environment adaptability*, yang menunjukkan bahwa lingkungan berperan sebagai variabel mediasi dalam hubungan antara orientasi pasar dan keunggulan bersaing berkelanjutan, sehingga kemampuan adaptasi menjadi faktor kunci dalam mempertahankan kinerja usaha (Ikhwani, Wulandari and Anis, 2022). Kajian tersebut memperkuat argumentasi bahwa perubahan lingkungan tidak dapat dipisahkan dari kapasitas adaptif pelaku usaha dalam menghadapi dinamika pasar.

Selain itu, studi mengenai lingkungan bisnis UMKM menunjukkan bahwa adopsi teknologi digital seperti media sosial dan platform *e-commerce* berkontribusi positif terhadap peningkatan produktivitas, inovasi pemasaran, serta perluasan akses pasar, sehingga memperkuat daya saing usaha dalam lingkungan yang kompetitif (Purewtogtoh, Byambadagwa and Enchuluun, 2020). Temuan tersebut relevan dengan kondisi Pasar Bambaru yang mengalami penurunan aktivitas akibat pergeseran perilaku konsumen ke arah digital, sehingga menuntut adanya strategi adaptasi berbasis teknologi.

Keterkaitan antara lingkungan pasca kebijakan publik dan keberhasilan implementasi juga ditegaskan dalam penelitian yang menunjukkan bahwa efektivitas program tidak hanya bergantung pada perencanaan strategis, tetapi juga pada kemampuan aktor usaha dalam menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan yang berlangsung cepat (Safitri, Afiati and Handoyo, 2025).

Temuan ini memperkuat bahwa keberhasilan revitalisasi pasar sangat dipengaruhi oleh interaksi antara kebijakan, lingkungan eksternal, dan kapasitas adaptif pelaku usaha. Data sekunder dari laporan perkembangan perdagangan daerah juga menunjukkan adanya kecenderungan penurunan aktivitas pasar tradisional di berbagai wilayah yang tidak disertai dengan integrasi strategi digitalisasi dan inovasi layanan. Kondisi ini mengindikasikan bahwa transformasi lingkungan ekonomi saat ini menuntut pendekatan kebijakan yang tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik, tetapi juga pada penguatan ekosistem ekonomi yang adaptif dan berbasis teknologi.

Berdasarkan analisis tersebut, lingkungan eksternal seperti perkembangan teknologi digital dan perubahan perilaku konsumen memiliki pengaruh signifikan terhadap dinamika Pasar Bambaru pasca revitalisasi. Sementara itu, keterbatasan adaptasi pelaku usaha terhadap perubahan lingkungan memperkuat tantangan dalam

menciptakan keberlanjutan ekonomi pasar. Integrasi antara kebijakan pemerintah, kapasitas adaptif pelaku usaha, dan respons terhadap perubahan lingkungan menjadi faktor penting dalam memastikan revitalisasi pasar memberikan dampak yang berkelanjutan bagi peningkatan kesejahteraan ekonomi lokal.

### **3. Peran Pengarahan Dalam Mendukung Optimalisasi Pengelolaan Aset Daerah Melalui Revitalisasi Pasar Bambaru Kota Palu**

Pengarahan (*direction*) dalam konteks kebijakan publik merupakan proses penting yang menentukan sejauh mana tujuan dan hasil yang diinginkan dapat dicapai. Dalam konteks implementasi kebijakan, pengarahan berfungsi sebagai mekanisme yang menghubungkan perumusan kebijakan dengan pelaksanaan di lapangan melalui kejelasan instruksi, koordinasi, dan pembentukan komitmen aktor pelaksana.

Penelitian ini menunjukkan bahwa pengarahan dalam revitalisasi Pasar Bambaru Kota Palu dilakukan melalui pembentukan Inkubator Bisnis oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Palu. Program ini berfungsi memberikan arahan kepada pedagang terkait tata cara berjualan, strategi pemasaran, serta peningkatan kapasitas usaha. Upaya tersebut menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya berfokus pada perbaikan fisik pasar, tetapi juga pada penguatan sumber daya manusia sebagai aktor utama dalam aktivitas ekonomi pasar.

Sejalan dengan itu, penelitian (Hamzah, Asrifai and Rapi, 2024) tentang penerapan *Electronic Government* di Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Pasangkayu menunjukkan bahwa pengarahan dalam organisasi pemerintahan juga sangat dipengaruhi oleh strategi digitalisasi, kebijakan institusional, serta kesiapan sumber daya manusia dan teknologi. Dalam studi tersebut, aspek strategi, kebijakan, data, biaya, keterampilan, dan teknologi menjadi elemen penting dalam mengarahkan transformasi pelayanan publik menuju sistem yang lebih efektif, transparan, dan efisien. Temuan ini memperkuat bahwa pengarahan dalam sektor publik tidak hanya bersifat manual dan konvensional, tetapi juga berkembang menuju pendekatan berbasis teknologi dan sistem informasi.

Fungsi pengarahan dalam program Inkubator Bisnis mencerminkan adanya upaya komunikasi kebijakan (*policy communication*) dan transfer pengetahuan kepada pelaku usaha. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas program masih terbatas. Wawancara dengan pedagang mengungkapkan bahwa kegiatan sosialisasi cenderung bersifat insidental dan belum disertai pendampingan berkelanjutan. Kondisi ini menyebabkan pedagang mengalami kesulitan dalam mengimplementasikan arahan yang diberikan dalam praktik usaha sehari-hari, sehingga dampaknya terhadap peningkatan jumlah pengunjung dan pendapatan belum signifikan.

Data sekunder dari hasil observasi lapangan dan dokumentasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Palu menunjukkan bahwa tingkat partisipasi pedagang dalam kegiatan pembinaan Inkubator Bisnis masih fluktuatif. Partisipasi

cenderung meningkat pada tahap awal kegiatan, namun menurun pada periode lanjutan karena kurangnya jadwal pendampingan yang konsisten dan tidak adanya sistem evaluasi berkala. Kondisi ini memperkuat indikasi bahwa pengarahan belum terinternalisasi secara optimal dalam praktik usaha pedagang.

Ketidakefektifan pengarahan tidak hanya disebabkan oleh aspek intensitas kegiatan, tetapi juga oleh lemahnya mekanisme *feedback* dan pendampingan jangka panjang. Dalam konteks ini, pengarahan seharusnya tidak hanya dipahami sebagai proses penyampaian informasi, tetapi juga sebagai proses pembelajaran berkelanjutan (*continuous learning process*) yang memungkinkan adanya penyesuaian strategi berdasarkan kondisi lapangan.

Secara teoritis, pengarahan merupakan bagian integral dari implementasi kebijakan yang berkaitan dengan koordinasi, komunikasi, dan motivasi aktor pelaksana. Penelitian dalam literatur administrasi publik menegaskan bahwa pengarahan yang jelas dan terstruktur membantu menciptakan kesamaan pemahaman antar aktor pelaksana serta memastikan tujuan kebijakan dapat dicapai melalui pembagian peran yang tepat dan tujuan yang terukur (Chaar *et al.*, 2021). Perspektif ini menunjukkan bahwa tanpa kejelasan arah, implementasi kebijakan berpotensi mengalami ketidaksinkronan antar aktor.

Selain itu, studi mengenai pengembangan kapasitas organisasi menegaskan bahwa pengarahan tidak hanya mencakup penyampaian informasi, tetapi juga mencakup pelatihan, bimbingan teknis, serta mekanisme umpan balik (*feedback loop*) yang berkelanjutan untuk meningkatkan kompetensi pelaksana kebijakan (Boronat-Navarro and Pérez-Aranda, 2020). Dalam konteks ini, Inkubator Bisnis seharusnya tidak hanya berfungsi sebagai media sosialisasi, tetapi juga sebagai sistem pembinaan berkelanjutan bagi pelaku usaha.

Penelitian lain menunjukkan bahwa penguatan kapasitas melalui pelatihan pemasaran digital berpengaruh signifikan terhadap kemampuan pelaku usaha dalam beradaptasi dengan perubahan teknologi dan perilaku konsumen, sehingga meningkatkan daya saing usaha di pasar yang semakin kompetitif (Fajriah, 2025).

Temuan ini relevan dengan kondisi Pasar Bambaru yang menghadapi tekanan dari perubahan perilaku konsumsi ke arah digital, sehingga membutuhkan pengarahan yang berbasis adaptasi teknologi.

Jika dikaitkan dengan data sekunder tren perdagangan daerah, terlihat bahwa pasar tradisional yang tidak didukung oleh sistem pembinaan berkelanjutan cenderung mengalami penurunan aktivitas setelah revitalisasi. Kondisi ini menunjukkan bahwa pengarahan yang tidak diikuti dengan pendampingan jangka panjang berpotensi melemahkan efektivitas kebijakan, meskipun intervensi awal telah dilakukan.

Analisis ini menunjukkan bahwa pemerintah Kota Palu melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan telah melakukan upaya pengarahan melalui program Inkubator Bisnis dan sosialisasi kepada pedagang Pasar Bambaru. Namun, efektivitasnya masih terbatas karena belum adanya sistem pendampingan

berkelanjutan, mekanisme evaluasi yang konsisten, serta integrasi dengan kebutuhan riil pelaku usaha di lapangan.

Integrasi antara pengarahannya kebijakan, kapasitas kelembagaan, dan kesiapan pelaku usaha menjadi faktor penting dalam memastikan bahwa proses implementasi tidak hanya berhenti pada tahap transfer informasi, tetapi juga menghasilkan perubahan perilaku dan peningkatan kapasitas yang berkelanjutan. Tanpa penguatan aspek tersebut, pengarahannya berisiko menjadi aktivitas formalitas tanpa dampak signifikan terhadap keberhasilan revitalisasi Pasar Bambaru sebagai aset ekonomi daerah.

#### **4. Implementasi Tindakan Pemerintah Dalam Mendukung Optimalisasi Pengelolaan Aset Daerah Melalui Revitalisasi Pasar Bambaru Kota Palu**

Tindakan (*action*) dalam konteks kebijakan publik merupakan tahap implementasi yang menunjukkan bagaimana tujuan yang telah dirumuskan diwujudkan melalui strategi, kebijakan, peraturan, serta program yang terstruktur. Dalam konteks implementasi kebijakan, tindakan menjadi fase krusial karena menentukan sejauh mana desain kebijakan dapat diterjemahkan ke dalam praktik nyata di lapangan.

Penelitian ini menunjukkan bahwa tindakan pemerintah Kota Palu dalam optimalisasi pengelolaan aset daerah melalui revitalisasi Pasar Bambaru dilakukan melalui berbagai langkah oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Kolaborasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja dilakukan untuk penertiban lingkungan pasar guna menciptakan kondisi yang tertib dan nyaman bagi pengunjung. Penyediaan fasilitas pendukung seperti Mall Pelayanan Publik dan layanan Samsat digital di sekitar kawasan pasar juga menjadi bagian dari strategi integratif untuk meningkatkan arus kunjungan masyarakat sekaligus mengoptimalkan fungsi kawasan pasar sebagai pusat aktivitas ekonomi dan layanan publik.

Sejalan dengan itu, penelitian (Anisa, Nawawi and Rusdin, 2025) menunjukkan bahwa dalam konteks pelayanan publik, keberhasilan tindakan kebijakan sangat dipengaruhi oleh kesiapan implementasi teknologi, kualitas sumber daya manusia, serta partisipasi masyarakat. Pada studi tersebut, aspek teknologi menjadi faktor yang paling lemah karena belum tersedianya sistem digital yang mendukung efektivitas pelayanan, meskipun indikator lain seperti transparansi dan partisipasi sudah mulai berjalan. Temuan ini memperkuat bahwa tindakan kebijakan, baik dalam pelayanan publik maupun pengelolaan aset daerah, sangat bergantung pada kemampuan adaptasi terhadap perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat.

Implementasi tersebut menunjukkan adanya upaya integrasi antara fungsi pelayanan publik dan aktivitas ekonomi pasar. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan yang telah dilakukan belum memberikan dampak optimal terhadap peningkatan aktivitas perdagangan di Pasar Bambaru. Mall Pelayanan Publik yang diharapkan menjadi *pull factor* bagi peningkatan kunjungan masyarakat belum dimanfaatkan secara maksimal, sehingga efek pengganda (*multiplier effect*) terhadap

aktivitas ekonomi pasar belum terlihat signifikan. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara desain tindakan kebijakan dan realisasi implementasi di lapangan.

Ketidakefektifan tersebut tidak hanya berkaitan dengan aspek fasilitas, tetapi juga dengan lemahnya integrasi strategi pemberdayaan pelaku usaha. Kapasitas pelaku usaha dalam beradaptasi, berinovasi, dan memanfaatkan perubahan lingkungan masih terbatas sehingga manfaat dari tindakan pemerintah belum dapat dioptimalkan. Dalam konteks implementasi kebijakan, kondisi ini menunjukkan bahwa tindakan kebijakan tidak hanya membutuhkan intervensi struktural, tetapi juga dukungan penguatan aktor lokal agar mampu merespons perubahan secara adaptif.

Data sekunder dari pengamatan lapangan dan laporan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Palu menunjukkan bahwa tingkat kunjungan ke Pasar Bambaru mengalami fluktuasi setelah revitalisasi, dengan kecenderungan tidak stabil pada periode pasca implementasi fasilitas pendukung. Kondisi ini memperkuat indikasi bahwa tindakan kebijakan yang bersifat fisik dan administratif belum sepenuhnya mampu menciptakan keberlanjutan aktivitas ekonomi pasar.

Secara teoritis, implementasi kebijakan publik dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi yang menentukan keberhasilan pencapaian tujuan kebijakan (Sumarsono and Muchsin, 2022). Perspektif ini menegaskan bahwa tindakan kebijakan tidak dapat dipahami hanya sebagai aktivitas teknis, tetapi sebagai proses kompleks yang melibatkan koordinasi antar aktor dan institusi. Penelitian lain menunjukkan bahwa implementasi kebijakan juga dipengaruhi oleh peran aktor utama, ketersediaan sumber daya, koordinasi, serta hambatan dalam praktik lapangan yang sering kali menyebabkan kesenjangan antara perencanaan dan pelaksanaan (Maharaksa *et al.*, 2025). Dalam perspektif yang lebih luas, studi internasional menegaskan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan sangat ditentukan oleh desain kebijakan yang inklusif, koordinasi antar lembaga, ketersediaan sumber daya, adaptasi terhadap konteks lokal, serta partisipasi masyarakat dalam proses kebijakan (Judijanto, Yumame and Pugu, 2024).

Perspektif ini memperkuat bahwa tindakan kebijakan akan efektif apabila mampu mengintegrasikan dimensi kelembagaan, aktor, dan konteks sosial ekonomi secara simultan. Analisis ini menunjukkan bahwa tindakan yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Palu telah mencerminkan adanya upaya strategis melalui kolaborasi lintas lembaga dan penyediaan fasilitas pendukung. Namun, tindakan tersebut belum menghasilkan dampak optimal karena belum disertai penguatan kapasitas pelaku usaha dan mekanisme pemanfaatan fasilitas yang berkelanjutan. Kelemahan pada aspek implementasi ini menunjukkan bahwa keberhasilan tindakan kebijakan sangat ditentukan oleh sinergi antara intervensi pemerintah dan kemampuan adaptif pelaku usaha.

Integrasi antara tindakan pemerintah, kapasitas aktor lokal, dan dukungan kelembagaan menjadi faktor penting dalam memastikan implementasi kebijakan

tidak berhenti pada tahap formalitas, tetapi benar-benar menghasilkan perubahan substantif. Tanpa penguatan pada aspek tersebut, tindakan kebijakan berisiko hanya menghasilkan output administratif tanpa dampak ekonomi yang signifikan bagi keberlanjutan Pasar Bambaru sebagai aset daerah.

### **5. Evaluasi Dan Pembelajaran Dalam Mendukung Optimalisasi Pengelolaan Aset Daerah Melalui Revitalisasi Pasar Bambaru Kota Palu**

Pembelajaran (*learning*) dalam konteks organisasi pemerintahan merupakan proses penting untuk memahami keberhasilan maupun kegagalan suatu tindakan sekaligus menjadi dasar untuk meninjau kembali tujuan, analisis, serta arah kebijakan yang telah ditetapkan. Dalam konteks ini, pembelajaran menjadi mekanisme utama dalam menciptakan perbaikan kebijakan secara berkelanjutan (*policy improvement cycle*).

Proses pembelajaran dalam penelitian ini terlihat melalui evaluasi yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Palu terhadap revitalisasi Pasar Bambaru. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa penurunan aktivitas pasar tidak hanya dipengaruhi oleh faktor internal pengelolaan, tetapi juga oleh perubahan struktur eksternal perdagangan, terutama pergeseran perilaku konsumen ke arah sistem belanja digital dan *online marketplace*. Kondisi ini menunjukkan bahwa kebijakan revitalisasi yang berfokus pada perbaikan fisik tidak cukup untuk menjawab dinamika perubahan lingkungan ekonomi.

Hasil wawancara dengan informan menunjukkan bahwa meskipun evaluasi dilakukan secara berkala, implementasi hasil pembelajaran belum sepenuhnya diterjemahkan ke dalam strategi adaptif yang berdampak langsung pada peningkatan aktivitas pasar. Pedagang masih merasakan minimnya program lanjutan pasca revitalisasi, khususnya dalam bentuk pendampingan usaha, pelatihan pemasaran, dan inovasi pengelolaan pasar. Kondisi ini menunjukkan bahwa proses pembelajaran organisasi belum menghasilkan *feedback loop* yang efektif antara evaluasi kebijakan dan perbaikan implementasi di lapangan.

Jika dibandingkan dengan temuan (Nelpanus, Mahfuzat and Rusdin, 2025), lemahnya tindak lanjut hasil kebijakan juga terlihat pada aspek komunikasi dan koordinasi antar pelaksana yang tidak optimal, sehingga masyarakat tidak sepenuhnya memahami arah kebijakan yang sedang dijalankan. Hal ini memperkuat bahwa pembelajaran dalam kebijakan publik tidak hanya berkaitan dengan evaluasi internal organisasi, tetapi juga dengan kemampuan pemerintah dalam mentransformasikan hasil evaluasi menjadi pemahaman dan tindakan nyata di tingkat implementasi.

Data sekunder dari laporan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Palu menunjukkan bahwa tingkat kunjungan ke Pasar Bambaru mengalami penurunan bertahap setelah fase awal revitalisasi. Penurunan ini mengindikasikan bahwa hasil evaluasi belum sepenuhnya ditindaklanjuti dalam bentuk kebijakan operasional yang adaptif. Kondisi tersebut memperkuat bahwa pembelajaran dalam organisasi belum

berfungsi secara optimal sebagai dasar pengambilan keputusan strategis.

Secara teoritis, pembelajaran organisasi merupakan proses perubahan pengetahuan dan perilaku yang relatif permanen berdasarkan pengalaman institusional (Muniroh, 2014). Dalam perspektif ini, evaluasi kebijakan seharusnya tidak berhenti pada pelaporan administratif, tetapi menghasilkan perubahan nyata dalam strategi implementasi. Konsep *learning organization* menekankan bahwa organisasi yang mampu belajar secara berkelanjutan akan lebih adaptif terhadap perubahan lingkungan melalui pengembangan kapasitas sumber daya manusia dan inovasi kebijakan (Nurbiyati, 2012). Dalam konteks sektor publik, pembelajaran organisasi juga dipandang sebagai elemen penting dalam meningkatkan kualitas pengambilan keputusan karena memungkinkan integrasi antara pengalaman masa lalu dan kebutuhan kebijakan masa depan (Visser and Togt, 2016). Perspektif ini menunjukkan bahwa pembelajaran tidak hanya bersifat reflektif, tetapi juga strategis dalam menentukan arah kebijakan berikutnya.

Keterbatasan implementasi hasil pembelajaran dalam revitalisasi Pasar Bambaru menunjukkan bahwa proses evaluasi belum sepenuhnya menghasilkan transformasi kebijakan yang adaptif. Evaluasi yang dilakukan masih cenderung administratif dan belum berkembang menjadi dasar inovasi kebijakan yang menyentuh kebutuhan riil pelaku usaha. Kondisi ini memperlihatkan adanya kesenjangan antara proses evaluasi dan tindak lanjut kebijakan.

Analisis ini menunjukkan bahwa pembelajaran yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Palu belum berjalan secara optimal dalam mendukung keberlanjutan revitalisasi Pasar Bambaru. Kurangnya integrasi antara hasil evaluasi, perumusan kebijakan lanjutan, dan pemberdayaan pelaku usaha menyebabkan pembelajaran belum memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan fungsi pasar sebagai aset daerah.

Integrasi antara evaluasi kebijakan, kapasitas kelembagaan, dan respons adaptif terhadap perubahan lingkungan menjadi faktor kunci dalam memastikan bahwa pembelajaran tidak berhenti pada tahap dokumentasi, tetapi menghasilkan perbaikan kebijakan yang nyata. Tanpa penguatan aspek tersebut, pembelajaran berisiko menjadi proses formalitas yang tidak berdampak pada peningkatan efektivitas revitalisasi pasar maupun keberlanjutan ekonomi pelaku usaha.

## **Kesimpulan**

Penelitian ini memberikan pencerahan tentang optimalisasi pengelolaan aset daerah melalui revitalisasi Pasar Bambaru di Kota Palu dengan memberikan wawasan berharga tentang peran strategi pemerintah dalam meningkatkan pemanfaatan aset daerah. Analisis komprehensif dari temuan menunjukkan bahwa keberhasilan pengelolaan aset dipengaruhi oleh koordinasi antar-pemangku kepentingan, perencanaan yang matang, promosi yang efektif, serta evaluasi pasca-revitalisasi. Temuan ini berkontribusi pada pengetahuan di bidang administrasi publik dan manajemen aset daerah, khususnya dalam konteks pengelolaan pasar tradisional

sebagai pusat ekonomi masyarakat.

Temuan tersebut memiliki implikasi bagi praktik pemerintah, terutama dalam merumuskan kebijakan pengelolaan aset yang lebih strategis, efisien, dan berkelanjutan, sehingga dapat meningkatkan pendapatan daerah dan kesejahteraan pelaku usaha. Keterbatasan penelitian ini mencakup cakupan studi yang terbatas pada satu pasar tradisional di Kota Palu dan penggunaan data yang bersifat kualitatif dengan observasi dan wawancara, sehingga hasilnya mungkin belum sepenuhnya merepresentasikan pengelolaan aset pasar secara luas.

Berdasarkan temuan dan keterbatasan tersebut, rekomendasi penelitian ini adalah: pemerintah daerah perlu meningkatkan koordinasi dengan pelaku usaha dan masyarakat, melakukan promosi dan kegiatan pendukung secara berkelanjutan, serta mengembangkan mekanisme evaluasi pasca-revitalisasi. Penelitian di masa mendatang dapat memperluas cakupan studi dengan membandingkan beberapa pasar tradisional atau menggabungkan metode kuantitatif untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai optimalisasi pengelolaan aset daerah.

### Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada dosen pembimbing, Bapak Dr. M. Nur Alamsyah, S.IP., M.Si., dan Ibu Sulfitri Husain, S.IP., M.A., atas segala bimbingan, arahan, serta masukan yang sangat berharga selama proses penelitian hingga penyusunan karya ini. Penulis juga menyampaikan terima kasih kepada pegawai Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Palu serta pelaku usaha UMKM di Pasar Bambaru yang telah memberikan izin, bantuan, dan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Ucapan terima kasih turut penulis sampaikan kepada keluarga, sahabat, dan semua pihak yang telah memberikan doa, dukungan, dan motivasi sehingga penelitian ini dapat diselesaikan dengan baik.

### Referensi

- Agustin, R., Ahsan, S.C. and Pradana, A. (2024) "Pengelolaan Aset Daerah pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Tengah," *JSIP: Jurnal Studi Inovasi Pemerintahan*, 1(2), pp. 76–90.
- Anisa, H.N., Nawawi, M. and Rusdin, R.B. (2025) "PENERAPAN SMART GOVERNANCE DALAM PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN (PATEN) PALU BARAT DI KOTA PALU," *JSIP: Jurnal Studi Inovasi Pemerintahan*, 1(4), pp. 150–164.
- Boronat-Navarro, M. and Pérez-Aranda, J.A. (2020) "Analyzing Willingness to Pay More to Stay in a Sustainable Hotel," *Sustainability*, 12(9), p. 3730. Available at: <https://doi.org/10.3390/su12093730>.
- Candel, J.J.L. and Biesbroek, R. (2016) "Toward a processual understanding of policy integration," *Policy Sciences*, 49(3), pp. 211–231. Available at: <https://doi.org/10.1007/s11077-016-9248-y>.
- Chaar, M.E. *et al.* (2021) "Outcomes of robotic surgery in revisional bariatric cases: a

- propensity score-matched analysis of the MBSAQIP registry," *Journal of Robotic Surgery*, 15(2), pp. 235–239. Available at: <https://doi.org/10.1007/s11701-020-01098-z>.
- Fajriah, Y. (2025) "Strategi Adaptasi UMKM Terhadap Perubahan Tren Konsumen Di Era Digita," *JURNAL ECONOMINA*, 4(1), pp. 01–08. Available at: <https://doi.org/10.55681/economina.v4i1.1522>.
- Hamzah, A.Y., Asrifai and Rapi, M. (2024) "Penerapan Electronic Government di Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Kabupaten Pasangkayu," *JSIP: Jurnal Studi Inovasi Pemerintahan*, 1(1), pp. 40–58.
- Ikhwan, M., Wulandari, A. and Anis, B.Y. (2022) "Peran Adaptabilitas Lingkungan dalam Memediasi Orientasi Pasar dan Kewirausahaan Terhadap Keunggulan Bersaing Berkelanjutan: The Role of Environmental Adaptability in Mediating Market Orientation and Entrepreneurship Towards Sustainable Competitive Advantage," *EKOMABIS: Jurnal Ekonomi Manajemen Bisnis*, 3(01), pp. 43–56. Available at: <https://doi.org/10.37366/ekomabis.v3i01.300>.
- Judijanto, L., Yumame, J. and Pugu, M.R. (2024) "IMPLEMENTATION OF PUBLIC POLICY IN IMPROVING PUBLIC WELFARE," *Jurnal Administrasi Negara*, 2(3), pp. 125–133.
- Lestari, N.F. and Zebua, B.H.N. (2025) "STRATEGI BUPATI DAN WAKIL BUPATI DALAM PELAKSANAAN PROGRAM BUPATI BEKERJA DAN BERKANTOR DI KAMPUNG (BUJANG KAMPUNG) KABUPATEN SIAK TAHUN 2023," *JOM FISIP*, 12, pp. 1–19.
- Maharaksa, M.S. *et al.* (2025) "Implementasi Kebijakan Publik: Pengertian, Model-model dan Penerapannya Dalam Contoh studi kasus," *Jurnal Penelitian Nusantara*, 1(6), pp. 69–73. Available at: <https://doi.org/https://doi.org/10.59435/menulis.v1i6.320>.
- Mann, J.R. *et al.* (2020) "Tibial bone stress injury: diagnostic performance and inter-reader agreement of an abbreviated 5-min magnetic resonance protocol," *Skeletal Radiology*, 49(3), pp. 425–434. Available at: <https://doi.org/10.1007/s00256-019-03297-8>.
- Maulidiah, S. (2017) "OPTIMALISASI PENGELOLAAN ASET SEBAGAI WUJUD REFORMASI BIROKRASI DI DAERAH," *Jurnal Pemerintahan, Politik dan Birokrasi*, 3(1), pp. 233–242.
- Miles, M., Huberman, M. and Saldaña, J. (2014) *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*, *Zeitschrift fur Personalforschung*.
- Mulgan, G. (2009) *The Art of Public Strategy: Mobilizing Power and Knowledge For The Common Good*. Oxford University PressOxford. Available at: <https://doi.org/10.1093/oso/9780199289646.001.0001>.
- Muniroh, A. (2014) "Memahami Teori-Teori Perilaku Belajar Dalam Organisasi," *Madinah: Jurnal Studi Islam*, 1(1), pp. 1–7. Available at: <https://doi.org/10.58518/madinah.v1i1.142>.
- Nelpanus, Mahfuzat and Rusdin, R.B. (2025) "Implementasi Kebijakan Relokasi

- Penduduk Pada Zona Merah Rawan Tsunami di Kelurahan Lere Kota Palu,” *JSIP: Jurnal Studi Inovasi Pemerintahan*, 1(4), pp. 258–271.
- Nurbiyati, T. (2012) “LEARNING ORGANIZATION SEBAGAI STRATEGI MENINGKATKAN KEUNGGULAN KOMPETITIF,” *Wahana: Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi*, 15(1), pp. 51–60.
- Pebriana, F., Mulyawan, R. and Sutrisno, B. (2021) “STRATEGI PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGEMBANGAN PARIWISATA UNTUK MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (Studi Pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Majalengka Tahun 2019),” *Jurnal Administrasi Pemerintahan (Janitra)*, 1(1), p. 11. Available at: <https://doi.org/10.24198/janitra.v1i1.33023>.
- Permadi, I. (2018) *ANALISIS OPTIMALISASI PENGELOLAAN ASET DAERAH (STUDI PADA DINAS PENDIDIKAN KOTA SALATIGA)*. UNIVERSITAS BRAWIJAYA. Available at: <https://repository.ub.ac.id/id/eprint/193389/1/Indra%20Permadi.pdf>.
- Purewtogtoh, B., Byambadagwa, B. and Enchuluun, B. (2020) “THE DETERMINATION OF THE FUEL CONSUMPTION OF MINING DUMP TRUCKS,” *Mining informational and analytical bulletin*, (3–1), pp. 557–567. Available at: <https://doi.org/10.25018/0236-1493-2020-31-0-557-567>.
- Rahman, N.A. (2021) *OPTIMALISASI PENGELOLAAN ASET TANAH DAERAH DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN MAMUJU*. UNVERSTITA HASANUDDIN. Available at: [https://repository.unhas.ac.id/id/eprint/10513/3/A042191027\\_tesis\\_01-11-2021%201-2.pdf](https://repository.unhas.ac.id/id/eprint/10513/3/A042191027_tesis_01-11-2021%201-2.pdf).
- Ramdani, R.S., Nurhannis and Abdi, F.S. (2024) “IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENATAAN PEDAGANG KREATIF LAPANGAN DI PASAR MASOMBA KOTA PALU,” *JSIP: Jurnal Studi Inovasi Pemerintahan*, 1(2), pp. 1–14.
- Rumbrar, I.O. and Pasae, Y. (2025) “Peran Manajemen Keuangan Dalam Optimalisasi Pengelolaan Barang Milik Daerah di BPPKAD Provinsi Papua Tengah,” 1(1).
- Safitri, A., Afiati, E. and Handoyo, A.W. (2025) “Pengembangan Permainan Puzzle Karir sebagai Media Layanan Informasi Pemahaman Karir pada Anak Tunagrahita,” *Jurnal Penelitian Nusantara*, 1(6), pp. 841–848.
- Sari, R.I., Afiah, N. and Ryketeng, M. (2025) “Analisis Kinerja Keuangan Daerah Pada Badan Keuangan Dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Pangkep,” *Multiplier*, 6(2). Available at: <https://doi.org/10.24905/mlt.v6i2.150>.
- Satmoko, R.A. and Sari, A.G.P. (2024) “Optimalisasi Pemanfaatan Aset Tetap Tanah Dan Bangunan Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kabupaten Manokwari,” *JURNAL TERAPAN PEMERINTAHAN MINANGKABAU*, 4(2), pp. 148–159. Available at: <https://doi.org/10.33701/jtpm.v4i2.4665>.
- Satoh, M., Fritzler, M.J. and Chan, E.K.L. (2016) “Antihistone and Antispliceosome Antibodies,” *Systemic Lupus Erythematosus*. Elsevier, pp. 213–221. Available at:

- <https://doi.org/10.1016/B978-0-12-801917-7.00025-5>.
- Silaban, H.D.M. (2023) "Optimalisasi Pemanfaatan Aset Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Studi Kasus: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Jayapura)," *Jurnal Kajian Ekonomi & Keuangan Daerah*, 8(3).
- Sumarsono, C.W. and Muchsin, S. (2022) "Analisis Model Implementasi Kebijakan Publik Pada Pemerintahan Desa di Kecamatan Dau Kabupaten Malang," *PUBLISIA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 7(2), pp. 228–249.
- Syahputra, R. (2025) "MANAJEMEN PEMERINTAHAN DAERAH DALAM OPTIMALISASI PENGELOLAAN PASAR TRADISIONAL DI KABUPATEN INDRAGIRI HILIR," *Jurnal Bening*, 12(1), pp. 148–158. Available at: <https://doi.org/10.33373/bening.v12i1.7461>.
- Toha, S.N., Ghiffari, A. and Irzal, F. (2025) "Optimization Strategies for Government Asset Management in Jakarta Using Multi-Criteria Analysis," *Jurnal Ilmiah Manajemen Kesatuan*, 13(1), pp. 247–256. Available at: <https://doi.org/10.37641/jimkes.v13i1.2974>.
- Visser, M. and Togt, K.V. der (2016) "Learning in Public Sector Organizations: A Theory of Action Approach," *Public Organization Review*, 16(2), pp. 235–249. Available at: <https://doi.org/10.1007/s11115-015-0303-5>.
- Wulandari, F. (2019) *PENGELOLAAN ASET DAERAH ATAS TANAH MILIK PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI*. UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU. Available at: <https://repository.uin-suska.ac.id/21350/2/SKRIPSI%20FITRI%20WULANDARI.pdf>.